

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pendidikan merupakan investasi yang paling utama bagi setiap bangsa, apalagi bangsa yang sedang berkembang, yang giat membangun negaranya. Pembangunan hanya dapat dilakukan oleh manusia, yang dipersiapkan untuk itu melalui pendidikan. Setiap pendidikan selalu berurusan dengan manusia, karena hanya manusia yang dapat dididik, karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang dikaruniai potensi untuk selalu menyempurnakan diri melalui proses belajar. Tujuan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orangtua, dan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal.

Masyarakat adalah komponen pendidikan nasional yang sangat berpengaruh dalam pengembangan pendidikan. Dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, harus ada hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat dan keluarga. Hubungan yang harmonis akan terwujud apabila ada saling pengertian antara sekolah, orang tua, dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang ada dalam masyarakat. Setiap

unsur mempunyai peran yang masing-masing, sehingga membentuk satu kesatuan dalam sebuah sistem masyarakat, seperti pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah mempunyai peran masing-masing yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Masyarakat dituntut untuk berpartisipasi aktif agar dapat lebih memahami, membantu, dan mengontrol proses pendidikan.

Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, dimana daerah diberi kebebasan untuk mengelola dan memberdayakan potensi sekolahnya masing-masing. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberdayakan daerah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan dan sebagai upaya untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan potensi masyarakat, sekaligus dapat menjamin terwujudnya demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan.

Komite Sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Majelis Madrasah, Majelis

Sekolah, Komite TK atau nama lain yang disepakati bersama (Kepmendiknas Nomor 044/U/2002).

Sekarang hampir semua sekolah telah mempunyai komite sekolah yang merupakan wakil masyarakat dalam membantu sekolah, sebab masyarakat dari berbagai lapisan sosial ekonomi sudah sadar betapa pentingnya dukungan mereka untuk keberhasilan pembelajaran di sekolah. Beberapa kasus yang muncul ke permukaan memang menampilkan komite sekolah sebagai sosok yang sama dengan BP3 pada masa lalu yang mengemban fungsi dan peran, yaitu sebagai lembaga yang mewadahi orang tua murid yang berfungsi mengumpulkan dana dari orang tua murid untuk menunjang pembiayaan pendidikan. Hal ini menjadi bukti bahwa pola pikir dan pola tindak lama (BP3) masih melekat dan diwarisi oleh sebagian besar personil yang duduk dalam keanggotaan komite. Ini perlu upaya serius dan kontinyu dari instansi terkait untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai fungsi komite sekolah.

Buruknya sosialisasi, minimnya pemahaman guru dan orang tua murid, komite sekolah yang dibentuk oleh kepala sekolah, dan belum jelas kemana komite diarahkan menjadi mengakibatkan disfungsi komite sekolah.

Sebetulnya banyak sekali jenis-jenis dukungan masyarakat pada sekolah. Namun sampai sekarang dukungan tersebut lebih banyak pada bidang fisik dan materi, seperti membantu pembangunan gedung, merehab sekolah, memperbaiki genting, dan lain sebagainya. Masyarakat juga dapat membantu dalam bidang teknis edukatif antara lain menjadi guru bantu, sumber informasi

lain, guru pengganti, mengajar kebudayaan setempat, keterampilan tertentu, atau sebagai pengajar tradisi tertentu. Namun demikian, hal tersebut belumlah terwujud karena berbagai alasan. Pada dasarnya masyarakat baik yang mampu maupun yang tidak mampu, golongan atas, menengah maupun yang bawah, memiliki potensi yang sama dalam membantu sekolah yang memberikan pembelajaran bagi anak-anak mereka. Akan tetapi hal ini bergantung pada bagaimana cara sekolah mendekati masyarakat tersebut. Oleh karena itu, sekolah harus memahami cara mendorong masyarakat khususnya komite sekolah yang terpilih sebagai wakil masyarakat di sekolah agar mereka mau berpartisipasi membantu sekolah. Dengan partisipasi komite sekolah yang tinggi dan ditunjang dengan adanya program sekolah yang berkualitas serta kegiatan-kegiatan sekolah kepada masyarakat yang fleksibel dan intens akan meningkatkan kinerja sekolah dan mutu hasil belajar siswa.

Masalah pendidikan di daerah terpencil telah lama kita sadari. Namun dengan dalih keterbatasan dana dan berbagai peraturan berlaku selalu dijadikan alasan untuk menunda pemecahan masalah tersebut. Pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam pembangunan dan pemerintahan memunculkan gagasan untuk mengembangkan desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan nasional. Otonomi ini dimaksudkan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi

sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.

Sekolah di daerah perkotaan yang tingkat pendidikan masyarakatnya cukup tinggi, maka tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan secara tidak langsung akan tinggi pula, sedangkan sekolah yang berada di lingkungan pedesaan atau di daerah terpencil maka hal tersebut akan sulit dicapai.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa partisipasi komite sekolah di SDN 12 Bongomeme masih perlu ditingkatkan demi pengembangan sekolah. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran orang tua siswa dalam menghadiri undangan rapat komite, selain itu juga masih ada orang tua siswa yang beranggapan bahwa siswa sepenuhnya adalah tanggung jawab guru. Sebagai desa terpencil, pendidikan masyarakat di sekitar sekolah masih cukup rendah, sehingga pemahaman masyarakat pada pendidikan juga masih rendah, hal ini dapat berdampak pada motivasi masyarakat untuk turut serta memajukan sekolah.

Terkait dengan permasalahan ini maka penulis tertarik untuk mengkaji partisipasi komite sekolah dalam empat komponen penting peran komite sekolah melalui penelitian yang diformulasikan dengan judul: **“Partisipasi komite sekolah dalam pengembangan sekolah di desa terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Partisipasi komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan di desa terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.
2. Partisipasi komite sekolah sebagai pendukung di desa terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.
3. Partisipasi komite sekolah sebagai pengontrol di desa terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.
4. Partisipasi komite sekolah sebagai mediator di desa terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang dilaksanakan penelitian adalah:

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang partisipasi komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan di desa terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mendapatkan gambaran tentang partisipasi komite sekolah sebagai pendukung di desa terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.
3. Untuk mendapatkan gambaran tentang partisipasi komite sekolah sebagai pengontrol di desa terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.

4. Untuk mendapatkan gambaran tentang partisipasi komite sekolah sebagai mediator di desa terpencil di SDN 12 Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi dinas pendidikan dalam upaya meningkatkan partisipasi komite sekolah di daerah terpencil.
2. Sebagai masukan bagi kepala sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah melalui kerjasama dengan komite sekolah.
3. Sebagai bahan masukan serta sosialisasi pada orang tua siswa dan masyarakat lainnya terhadap peningkatan peran dan fungsi komite sekolah demi kualitas pendidikan di desa terpencil.
4. Dapat meningkatkan pengetahuan dalam penyusunan skripsi serta sebagai masukan terhadap berbagai bidang ilmu pengetahuan berkaitan dengan pentingnya partisipasi komite sekolah dalam peningkatan kualitas pendidikan.